



PEMERINTAH KOTA BIMA

**RENCANA KERJA TAHUN
2019**

**DINAS KOPERASI,
PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KOTA
BIMA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT., karena berkat karunia-Nya, tim penyusun Rencana Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima dapat menyelesaikan "*Rencana Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan Kota Bima Tahun 2019*".

Renja ini secara garis besar mengupas tentang tujuan, sasaran, program & kegiatan dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima pada tahun 2019.

Dengan segala keterbatasan, perumusan dokumen Renja ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu.

Kami menyadari, Renja ini masih banyak kekurangannya, namun demikian, kami berharap, dengan Renja ini semua kebijakan, program dan kegiatan yang kami susun dapat mengarahkan semua kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh semua elemen baik aparatur pemerintah Kota Bima maupun masyarakat, serta DPRD dapat mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati. Renja ini juga diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima maupun bagi pihak lain yang memerlukannya.

Raba-Kota Bima, 16 Januari 2018

Kepala Dinas Koperindag Kota Bima,

ttd

Nurjanah, S.Sos

Nip. 19631016 198703 2 009

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistimatik Penulisan	4
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu	6
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan OPD	13
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	15
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	23
2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan	23
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	26
3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasioanl dan Propinsi	26
3.2 Tujuan dan sasaran Renja OPD	26
3.3 Program dan Kegiatan	27
BAB IV. PENUTUP	28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada Pasal 4 Ayat 1, menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) maupun Rencana Kerja

(Renja) OPD tersebut merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang wajib disusun. Adapun salah satu dokumen perencanaan tersebut yaitu Dokumen Renja yang mempunyai peranan sangat strategis, karena menjembatani antara kepentingan perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Rencana Kerja (Renja) OPD adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra OPD yang akan digunakan sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah (RKP). Renja OPD memuat tentang sasaran yang akan dicapai, arah kebijakan, program, kegiatan dan kebutuhan pendanaan.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Renja OPD, adalah sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra OPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD.
2. Penyusunan Renja OPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.
3. Substansi Renja OPD memuat evaluasi status, kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan OPD terhadap Renstra OPD; evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu; rumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan; dana indikatif serta sumber dananya dan prakiraan maju.
4. Penyusunan program dan kegiatan OPD untuk tahun yang direncanakan mengacu pada ketentuan SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan mempertimbangkan capaian kinerja SPM yang ada (jika SPM untuk kegiatan dimaksud tersedia).
5. Rumusan program/kegiatan di dalam renja OPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing OPD.

6. Program/kegiatan dalam RKPD Provinsi dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan untuk didanai APBD Provinsi, APBN dan sumber lainnya, sedangkan untuk RKPD Kabupaten/Kota dirinci menurut sumber dana APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN dan sumber dana lainnya.
7. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Mengacu pada prinsip-prinsip tersebut diatas, maka Penyusunan Renja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima Tahun 2019 juga berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima Tahun 2018-2023 dan mengacu pada RKPD Kota Bima Tahun 2019. Renja ini disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka menunjang Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih. Program dan kegiatan dalam Renja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima tahun 2019 masih bersifat indikatif karena masih harus diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah. Benang merah Rencana Kerja OPD sebagai penguatan Rencana Strategis OPD adalah bagaimana mendorong pembangunan Kota Bima dalam rangka mencapai Visi dan Misinya.

Adapun Visi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima adalah:

“Berkembangnya Perekonomian Daerah Kota Bima Yang Berorientasi Pada Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Dan Kelembagaan Usaha ”

Untuk mencapai Visi yang telah ditetapkan, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima menetapkan 3 (tiga) Misi yang akan menjadi pegangan dalam mengembangkan atau merumuskan langkah - langkah selanjutnya sebagai berikut :

1. Mewujudkan arus perdagangan barang dan jasa yang tertib, wajar dan transparan;
2. Meningkatkan pengendalian serta kelancaran distribusi barang dan jasa, perlindungan konsumen dan kemetrolgian;
3. Pemberdayaan kelembagaan system ekonomi kerakyatan melalui deversifikasi usaha Perkoperasian, UMKM dan IKM ;
4. Mewujudkan Industri yang berwawasan lingkungan dengan memperhatikan aspek ekonomi daerah;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang koperasi, perindustrian dan, perdagangan.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4118);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558).
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 471);
17. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011-2031;
18. Peraturan Walikota Bima Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana kerja merupakan penjabaran dari sasaran & program yang telah ditetapkan rencana strategi, penyusunan rencana kerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan & kebijakan anggaran. Tujuan utama dari rencana kerja adalah untuk :

- a. Menghubungkan rencana strategis, action plan & perencanaan operasional terperinci;
- b. Membantu pencapaian hasil pelaksanaan program / kegiatan;
- c. Memudahkan proses pengukuran kinerja;
- d. Membantu monitoring & evaluasi kinerja;
- e. Membantu menetapkan tujuan kinerja pada periode yang akan datang.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima 2019 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA – OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

OPD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III

TUJUAN, STRATEGI DAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan

3.2 Tujuan dan sasaran Renja OPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV

PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA – OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Dinas Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima pada Tahun 2017 mengelola anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp.2.261.513.761,31. realisasi sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp.2.232.346.855. atau 98,71 % dari pagu anggaran. Sedangkan pagu anggaran belanja langsung Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima yang bersumber dari dana APBD Kota Bima Tahun 2017 berjumlah sebesar Rp.,8.533.545.800-. Sampai dengan 31 Desember 2017, realisasi serapan anggaran sebesar Rp. 8.260.644.634 - atau 96,30%. Jika dibandingkan dengan pagu anggaran belanja langsung Tahun 2016 sebesar Rp.9.596.280.750,- maka pada Tahun 2017 terjadi penurunan pagu anggaran sebesar Rp.1.062.734.950,- atau sekitar 11,07%. Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima pada Tahun 2017 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan APBD Kota Bima. Adapun realisasi anggaran per 31 Desember 2017 sebagaimana pada tabel 1 dibawah ini :

Tabel 1 .

Realisasi Anggaran Per 31 Desember 2017

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
I	Pendapatan			
1	Pendapatan Asli Daerah	1.325.365.309,30	504.953.086.	38,10
II	Belanja			
1.	Belanja Tidak Langsung			
	- Belanja Pegawai	2.261.513.761,31	2.232.346.855.	98,71
2.	Belanja langsung			
	- Belanja Pegawai	588.583.999,99.	528.458.000.	89,78
	- Belanja Barang dan Jasa	3.240.971.800.	3.067.667.634.	94,65
	- Belanja Modal	4.703.990.000.	4.664.519.000.	99,16

Alokasi anggaran program dan kegiatan pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima TA. 2017 adalah sebagai berikut :

1. Program dan kegiatan rutin Dinas yang membiayai 4 program dan 19 kegiatan menyerap anggaran sebesar Rp.1.526.465.557,-.
2. Program dan kegiatan urusan Koperasi yang membiayai 5 program dan 9 kegiatan menyerap anggaran sebesar Rp. 754.488.100,-
3. Program dan kegiatan urusan Perindustrian yang membiayai 4 program dan 8 kegiatan menyerap anggaran sebesar Rp. 2.353.376.143,-.

4. Program dan kegiatan urusan Perdagangan yang membiayai 2 program dan 4 kegiatan menyerap anggaran sebesar Rp. 3.899.216.000-

Untuk lebih jelasnya realisasi anggaran per program TA. 2017 dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini :

Tabel 2.

Realisasi Anggaran Per Program Tahun Anggaran 2017

No	Program	Pagu Anggaran Rp	Realisasi Rp.	Capaian Keu. %	Fisik %
1	2	3	4	5	6
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,276,198,557	1,232,949,665	96.61	96.61
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	136,807,000	135,110,000	98.76	98.76
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	24,260,000	24,260,000	100.00	100.00
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	89,200,000	89,200,000	100.00	100.00
5	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	155,410,000	154,596,000	99.48	88,75
6	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	181,510,000	125,730,000	69.27	85.75
7	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	297,264,000	255,352,500	85.90	110.91
8	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	203,631,000	189,284,300	92.95	73.25
9	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	103,313,300	84,170,000	81.47	118
10	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	292,370,500	290,150,614	99.24	66.45
11	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	175,439,400	153,948,519	87.75	59.78
12	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	3,601,952,000	3,585,767,713	99.55	100
13	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	156,440,200	151,609,680	96.91	112,50
14	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	1,792,795,743	1,742,175,643	97.18	98.65
15	Program Peningkatan Pengawasan Koperasi dan UMKM	46,954,100	46,340,000	98.69	85.25
	JUMLAH	8,533,545,800	8,260,644,634	96.80	86.19

dengan menggunakan format Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran dilakukan pengukuran kinerja untuk tahun 2017 dan berdasarkan tabel diatas diperoleh hasil capaian keuangan Dinas

Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima sebesar 96,80 % dan capaian kinerja 86,19%. Dengan capaian keuangan dan kinerja tersebut Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima dapat kategorikan sebagai instansi yang berhasil dalam pencapaian kerjanya. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/ kegagalan tersebut sebagai umpan balik/feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Beberapa evaluasi realisasi program/kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut :

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Pada tahun 2017 ini terdapat 7 (tujuh) program di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima yang tidak memenuhi target kinerja ($\leq 100\%$) sebagaimana yang telah direncanakan yaitu : Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM (66,45%), Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif (88,75%), Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi (85,75%), Program Pengembang Industri Kecil dan Menengah (73,25%), Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri (59,78%), Program Pengembang Sentra-sentra Industri Potensial (98,65%) dan Program Peningkatan Pengawasan Koperasi dan UMKM (85,25%) . Penyebab tidak terpenuhinya target kegiatan tersebut diatas disebabkan karena keterlambatan waktu pelaksanaan kegiatan akibat dari padat nya jadwal instruktur dan narasumber dan terlambatnya ketersediaan anggaran akibat dari lambatnya kegiatan ganti uang (GU) oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sehingga program dan kegiatan tersebut sebagian tidak dapat dilaksanakan.

b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Dari 15 program dan 43 kegiatan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima pada tahun 2017 yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran sesuai dengan yang direncanakan (100%) hanya sebanyak 2 program yaitu : Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM dan Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.

c. Faktor-faktor yang menyebabkan tercapainya/terpenuhinya target kinerja program/kegiatan.

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan adalah adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja untuk tahun yang bersangkutan sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai harapan, dalam hal ini koordinasi dan pemahaman tugas sangat perlu guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.

d. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD.

Dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima sehingga implikasi yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target capaian program Renstra adalah adanya peningkatan dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan program/kegiatan yang tercantum dalam rencana strategis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima.

e. Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut.

Adapun kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran untuk rencana program/kegiatan adalah mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dan memberikan argumentasi atau program/kegiatan tersebut sehingga nantinya dapat dianggarkan pelaksanaan program/kegiatan yang mengarah pada pengembangan pelayanan.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2017 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan kota Bima dapat dilihat pada Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel.3

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA

DAN PENCAPAIAN RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN 2017

Nama SKPD : Dinas Koperindag Kota Bima

No	Kode Rek.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2014 s/d 2018 (Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Pada Tahun Berjalan Yang dievaluasi (2017)		Realisasi Kinerja Tahun 2017												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Pada Yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2017 (akhir tahun pelaksanaan Renja pada akhir tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah sd Tahun 2017 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										k	satu an	Rp	k	satu an	Rp	k	satu an	Rp	k	satu an	Rp	k	satu an	Rp	K	Rp	K	Rp	K		
1		3	4	5		6		7		8			9			10			11			12=8+9+10+11		13=12/7*100 %		14=6+12		15=14/5*100		16	17
1	21101	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Eksistensi Dinas terhadap Penyediaan barang /jasa dan administrasi perkantoran	100 %	3,744,837,814	96.52 %	699,205,922	100 %	1,276,198,557	16 %	203,136,962	18 %	229,597,520	19 %	237,194,429	44 %	563,020,754	96.61	1,232,949,665	96.61	96.61	193.13	1,932,155,587	193.13	51.60	Dinas Koperindag					
		01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jasa surat menyurat selama 12 bulan	100 %	192,310,650	100 %	22,300,000	100 %	346,500,000	14 %	48,800,000	17 %	57,900,000	22 %	76,885,000	44 %	151,600,000	96.73	335,185,000	96.73	96.73	196.73	357,485,000	196.73	185.89					
		02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan	90 %	385,537,065	90 %	65,514,363	90 %	116,480,000	10 %	13,171,933	14 %	18,510,878	27 %	34,915,505	20 %	26,006,108	71.55	92,604,424	79.50	79.50	161.55	158,118,787	179.50	41.01					
		06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional selama 12 bulan	93 %	216,071,699	93 %	1,270,200	93 %	1,600,000	- %	-	- %	-	69 %	1,179,700	- %	-	68.57	1,179,700	73.73	73.73	161.57	2,449,900	173.73	1.13					
		07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jasa administrasi keuangan selama 12 bulan	100 %	191,700,140	100 %	41,400,000	100 %	54,000,000	- %	-	18 %	9,450,000	18 %	9,450,000	57 %	30,900,000	92.22	49,800,000	92.22	92.22	192.22	91,200,000	192.22	47.57					

			08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa kebersihan kantor selama 12 bulan	100%	94,018,540	100%	20,079,000	100%	26,380,000	18%	4,794,000	18%	4,794,000	25%	6,570,000	39%	10,220,000	99.99	26,378,000	99.99	99.99	199.99	46,457,000	199.924185	49.41		
			10	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan alat tulis kantor selama 12 bulan	100%	222,305,006	100%	39,374,000	100%	39,294,000	25%	9,820,000	25%	9,824,000	25%	9,750,000	25%	9,900,000	100.00	39,294,000	100.00	100.00	200.00	78,668,000	200.00	35.39		
			11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan	100%	171,309,106	100%	45,674,000	100%	154,900,000	2%	3,860,000	10%	15,200,000	10%	14,980,000	78%	120,860,000	100.00	154,900,000	100.00	100.00	200.00	200,574,000	200.00	117.08		
			13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan	100%	416,905,069	100%	7,690,000	100%	53,160,000	17%	9,000,000	2%	1,160,000	-	-	77%	41,088,000	96.40	51,248,000	96.40	96.40	196	58,938,000	196.40	14.14		
			15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 12 bulan	100%	72,284,384	100%	4,990,000	100%	5,040,000	14%	690,000	25%	1,270,000	2%	675,000	46%	2,320,000	86.75	4,955,000	86.75	98.31	186.75	9,945,000	186.75	13.76		
			17	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan makanan dan minuman selama 1 tahun	100%	108,792,882	100%	38,457,200	100%	38,305,000	20%	7,517,000	17%	6,432,000	36%	13,901,000	27%	10,449,000	99.98	38,299,000	99.98	99.98	199.98	76,756,200	199.98	70.55		
			18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	perjalanan	1,673,603,273	55	378,527,159	55	393,846,357	14	99,144,029	13	93,056,642	8	59,788,224	13	140,477,646	48	392,466,541	87.62	99.65	103	770,993,700	37.52	46.07		
			19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	perjalanan	-	50	33,930,000	50	46,693,200	7	6,340,000	13	12,000,000	10	9,100,000	12	19,200,000	41	46,640,000	82.77	99.89	91	80,570,000	#DIV/0!	#DIV/0!		
2	2	11	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya pelayanan & pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	100%	173,911,400	100%	57,529,531	100%	136,807,000	8.26	11,300,000	70.98	97,105,000	6.06	8,285,000	13.46	18,420,000	98.76	135,110,000	98.76	98.76	198.76	192,639,531	198.76	110.77	Dinas Koperindag	
			22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang mendapat pemeliharaan selama 1 tahun	unit	30,000,000	3	19,995,500	1	89,500,000	-	1	unit	89,500,000	-	-	unit	-	1	89,500,000	100.00	100.00	4	109,495,500	200.00	364.99		
			24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan selama 1 tahun,	unit	58,440,000	4	24,120,031	4	25,876,000	1	4,700,000	1	5,605,000	1	6,835,000	1	8,420,000	4	25,560,000	93.16	98.78	8	49,680,031	193.16	85.01		

					28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang mendapat pemeliharaan selama tahun	7	jenis peralatan	85,471,400	7	jenis peralatan	13,414,000	7	jenis peralatan	21,431,000	2	unit	6,600,000	1	unit	2,000,000	1	unit	1,450,000	3	unit	10,000,000	7	20,050,000	101.08	93.56	14	33,464,000	201.08	39.15		
3	2	11	03			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur	100	%	41,970,000	100	%	24,940,000	100	%	24,260,000	100	%	24,260,000	-	Stel	-	-	Stel	-	-	Stel	-	100	24,260,000	100.00	100.00	200.00	49,200,000	200.00	117.23	Dinas Koperindag	
					02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pegawai yang mendapat PDH	132	stel	41,970,000	32	stel	24,940,000	32	stel	24,260,000	32	stel	24,260,000	-	stel	-	-	stel	-	-	stel	-	32	24,260,000	100.00	100.00	64	49,200,000	48.48	117.23		
5	2	11	06			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan dengan indeks SAKIP	100	%	259,357,293	85.00	%	89,700,000	100	%	89,200,000	25.00	%	25,750,000	4.00	%	5,500,000	6.00	%	8,250,000	52.00	%	49,700,000	87.00	89,200,000	87.00	100.00	172	178,900,000	172.00	68.98	Dinas Koperindag	
					02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen /laporan keuangan semesteran	10	dok	52,211,250	2	dok	10,000,000	2	dok	16,500,000	1	dok	8,250,000	-	dok	-	1	dok	8,250,000	-	dok	-	2	16,500,000	100.00	100.00	4	26,500,000	40.00	50.76		
					05	Penyusunan rencana kerja tahunan/RKA/DPPA SKPD	Jumlah dokumen	15	dok	138,463,668	3	dok	39,950,000	3	dok	55,200,000	-	dok	-	1	dok	5,500,000	-	dok	-	2	dok	49,700,000	3	55,200,000	100.00	100.00	6	95,150,000	40.00	68.72		
					06	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	Jumlah dokumen	15	dok	68,682,375	3	dok	39,750,000	3	dok	17,500,000	3	dok	17,500,000	-	dok	-	-	dok	-	-	dok	-	3	17,500,000	100.00	100.00	6	57,250,000	40.00	83.35		
6	2	11	15			Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Terpenuhinya operasional PLUT			-			100	%	155,410,000	4.72	%	7,341,000	47.86	%	74,380,000	2.26	%	3,507,000	44.64	%	69,368,000	99.48	154,596,000	99.48	99.48	99.48	154,596,000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Koperindag		
					12	Operasional dan pengembangan UPT PLUT	Terpenuhi dan tersedianya operasional UPT PLUT selama 12 bulan			-			100	%	155,410,000	4.72	%	7,341,000	47.86	%	74,380,000	2.26	%	3,507,000	44.64	%	69,368,000	99.48	154,596,000	99.48	99.48	99.48	154,596,000	#DIV/0!	#DIV/0!			

7	2	1	1	6	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	Meningkatnya pertumbuhan wirausaha baru	150 umkm	929,928,832	373 umkm	26,625,000	150 umkm	103,313,300	- umkm	20,266,500	- umkm	750,000	201 umkm	10,648,000	154 umkm	52,505,500	355	84,170,000	52.00	81.47	451	110,795,000	300.67	11.91	Dinas Koperindag
				06	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Jumlah pertumbuhan wirausaha baru	150 umkm	929,928,832	373 umkm	26,625,000	150 umkm	17,078,600	- umkm	-	- umkm	-	201 umkm	10,648,000	154 umkm	270,000	355	10,918,000	52.00	63.93	451	37,543,000	300.67	4.04	
				07	Penyenggaraan bimbingan teknis bagi UMKM	Jumlah umkm yang dibina			30 umkm		30 umkm	86,234,700	7 umkm	20,266,500	0 umkm	750,000	- umkm	-	18 umkm	52,235,500	25	73,252,000	84.94	84.94	25	73,252,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
8	2	1	1	7	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Meningkatnya pertumbuhan UMKM	1609 umkm	464,341,696	1359 umkm	142,039,803	1559 umkm	292,370,500	440 umkm	22,938,000	737 umkm	72,139,737	- umkm	169,897,501	155 umkm	25,175,376	1,332	290,150,614	85.44	99.24	2,691	432,190,417	167.25	93.08	Dinas Koperindag
				07	Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga	Meningkatnya kerja sama UMKM dengan perbankan/ no perbankan	85 %	-	85 %	41,682,000	85 %	61,025,000	16.19 %	11,624,000	32.87 %	23,600,000	35.31 %	25,350,000	- %	-	84.37	60,574,000	99.26	99.26	169	102,256,000	199.26	#DIV/0!	
				09	Penyelenggaraan promosi produk UMKM	Jumlah UMKM	50 U M K M	464,341,696	10 umkm	100,357,803	10 umkm	191,220,000	- umkm	2 umkm	23,825,737	8 umkm	144,547,501	2 umkm	21,175,376	12	189,548,614	115.59	99.13	22	289,906,417	43.12	62.43		
				11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah pertumbuhan UMKM			-	1559 umkm		40,125,500	440 umkm	11,314,000	737 umkm	24,714,000	- umkm	-	155 umkm	4,000,000	1,332	40,028,000	85.44	99.76	1,332	40,028,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
9	2	1	1	8	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Meningkatnya jumlah Koperasi Aktif		41,190,000		53,126,500	96 koperasi	156,440,200	93 koperasi	7,251,000	2 koperasi	23,477,000	7 koperasi	34,834,498	3 koperasi	86,047,182	105	151,609,680	-	-	-	204,736,180	-	0.00	Dinas Koperindag
				04	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman koperasi	Meningkatnya pengetahuan tentang perkoperasian	85 %	41,190,000	85 %	53,126,500	85 %	101,275,200	-	10.87 %	12,950,000	25.12 %	29,928,498	48.90 %	58,257,182	84.88	101,135,680	99.86	99.86	169.88	154,262,180	199.86	374.51		
				10	Pendampingan bagi kelembagaan koperasi	Jumlah koperasi aktif			-	96 koperasi		55,165,000	93 koperasi	7,251,000	5 koperasi	10,527,000	7 koperasi	4,906,000	3 koperasi	27,790,000	108	50,474,000	112.50	91.50	108	50,474,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
#	2	1	1	5	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Konsumen	245 unit	500,000,000	225 unit	121,611,500	220 unit	297,264,000	37 unit	19,890,000	63 unit	85,360,000	69 unit	93,568,500	75 unit	56,534,000	244	255,352,500	111.10	85.90	469.42	376,964,000	191.60	75.39	Dinas Koperindag

				0 1	Pengawasan, pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM	Terlaksananya pemberdayaan dan pengembangan KUMKM			85 %	46,954,100	- %	-	42.00 %	23,200,000	20.37 %	11,250,000	21.52 %	11,890,000	83.89	46,340,000	98.69	98.69	83.89	46,340,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
					JUMLAH		19,422,952,261			8,904,364,486			393,041,462		1,018,079,513		2,346,880,710		4,502,642,949		8,260,644,634		96.80		17,165,009,120		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Jenis pelayanan kepada masyarakat yang disediakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima antara lain meliputi :

- a. Pendidikan dan Pelatihan Bagi Masyarakat
Pendidikan dan Pelatihan ini dilaksanakan oleh Bidang Koperasi dan Perindustrian. Kegiatan pada Bidang Koperasi lebih ditujukan untuk pembentukan Wirausaha baru sedangkan Bidang Perindustrian ditujukan untuk peningkatan keahlian dari Industri Kecil dan Menengah.
- b. Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
Pengawasan ini dilakukan oleh Bidang Perdagangan. Pengawasan yang dilakukan antara lain pengawasan terhadap cukai rokok ilegal dan barang kadaluarsa.
- c. Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan
Sosialisasi ini dilakukan oleh Bidang Koperasi dan Bidang Perdagangan. Sosialisasi yang dilakukan oleh Bidang Koperasi terutama mengenai Undang-undang perkoperasian, sedangkan Bidang Perdagangan lebih kearah barang-barang ilegal.
- d. Operasi Pasar Murah
Operasi pasar murah diadakan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok yang sulit terjangkau diakibatkan kenaikan harga bahan pokok. Adapun bahan pokok yang disediakan adalah beras, gula dan minyak goreng.
- e. Pemberian Bantuan Peralatan
Bantuan peralatan ini ditujukan untuk Bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan. Tujuan dari pemberian bantuan ini adalah untuk menciptakan wirausaha baru yang didahului dengan pemberian pelatihan, meningkatkan hasil dan kapasitas produksi.
- f. Pembinaan Koperasi dan Industri Kecil Menengah
Pembinaan Koperasi ini dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan Koperasi menuju Koperasi yang sehat dan berkualitas. Pembinaan Industri Kecil Menengah ditujukan untuk membenahi manajemen, keuangan, produksi dan pemasaran.

Untuk lebih jelasnya mengenai pencapaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Perindustria dan Perdagangan Kota Bima dapat dilihat pada tabel 4.

TABEL. 4
CAPAIAN KINERJ UTAMA PELAYANAN DINAS KOPERINDAG KOTA BIMA

No	Sasaran Stragis	Indikator Kinerja	Target										Realisasi								
			2014		2015		2016		2017		2018		2014		2015		2016		2017		
1	2	3	4		5		6		7		8		4		5		6		7		
1	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Barang dan Jasa	Jumlah Pasar Tradisional	6	Unit	7	Unit	8	Unit	9	Unit	10	Unit	7	Unit	7	Unit	8	Unit	8	Unit	
		Jumlah Bahan Pokok	9	Bahan Pokok	9	Bahan Pokok	9	Bahan Pokok	9	Bahan Pokok	9	Bahan Pokok	9	Bahan Pokok	9	Bahan Pokok	9	Bahan Pokok	9	Bahan Pokok	9
2	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Konsumen	Jumlah UTTP yang ditera dan ditera ulang	163	Unit	180	Unit	200	Unit	220	Unit	245	Unit	187	Unit	213	Unit	225	Unit	244	Unit	
3	Meningkatnya Pertumbuhan UMKM	Jumlah Wirausaha baru	150	UMKM	150	UMKM	150	UMKM	150	UMKM	150	UMKM	231	UMKM	233	UMKM	255	UMKM	177	UMKM	
		Jumlah UMKM yang tumbuh	1269	UMKM	1409	UMKM	1459	UMKM	1559	UMKM	1609	UMKM	1125	UMKM	1355	UMKM	1557	UMKM	1332	UMKM	
4	Meningkatnya Koperasi Berbasis Usaha Bersama	Jumlah Koperasi Aktif	74	Koperasi	81	Koperasi	86	Koperasi	96	Koperasi	101	Koperasi	76	Koperasi	85	Koperasi	96	Koperasi	108	Koperasi	
5	Meningkatnya Iklim Usaha Daerah	Jumlah Sentra Industri daerah	73	Sentra	73	Sentra	74	Sentra	74	Sentra	74	Sentra	71	Sentra	71	Sentra	72	Sentra	73	Sentra	
		Bertambahnya Jumlah IKM	129	IKM	142	IKM	149	IKM	157	IKM	164	IKM	195	IKM	235	IKM	325	IKM	94	IKM	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Kondisi lingkungan kerja yang diharapkan tentunya dapat memberikan dukungan optimal terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, program kerja Dinas/Instansi serta stakeholder guna terwujudnya Visi Pembangunan Daerah dan pencapaian sasaran program pembangunan menuju Kota Bima “Water Front City”.

Potensi sumber daya alam di Kota Bima (cadangan pertanian, hutan, kelautan dan perikanan, batu marmer dll) sangat potensial untuk menumbuh kembangkan koperasi, industri dan perdagangan berbasis sumber daya alam. Walaupun telah dicapai berbagai perkembangan yang cukup penting dalam perkembangan koperasi, industri dan perdagangan, namun dirasakan belum seperti yang diharapkan.

Menyikapi hal demikian perlu diketahui dan dicermati kondisi lingkungan kerja pada saat ini dan kondisi lingkungan kerja yang diharapkan dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT.

2.3.1. Kondisi Saat Ini

1. Kerjasama dan saling keterkaitan dalam pembinaan dan pengembangan koperasi, industrialisasi, perdagangan dengan para BUMN belum terprogram dan berjalan secara optimal,
2. Sarana dan Fasilitas penunjang operasional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat koperasi, industri dan pedagang belum memadai,
3. Tugas fungsional yang ada baik dibidang koperasi, industri maupun perdagangan belum memenuhi formasi kebutuhan yang diharapkan,
4. Sistem dan prosedur kerja yang berkaitan dengan penataan, dan pengelolaan Asset, Kekayaan daerah belum berjalan secara optimal,
5. Tingkat produktivitas dan kesadaran PNS dalam mengemban tugas, berkreasi dan berinovasi rata-rata belum maksimal,
6. Sumber pembiayaan dalam melaksanakan kegiatan rutinitas perkantoran dan pembinaan terhadap usaha industri dan perdagangan diperoleh dari APBD dan APBN yang relatif terbatas.

2.3.2. Kondisi Yang Diharapkan

1. Optimalisasi pengembangan kerjasama dengan para BUMN dan instansi terkait dalam pembinaan Koperasi, industri dan pedagang dapat dilaksanakan berjalan dengan baik,
2. Berupaya meningkatkan sarana dan fasilitas penunjang dalam pelaksanaan pembinaan serta fasilitasi kepada dunia usaha (industri dan pedagang),
3. Berupaya mendapatkan tambahan formasi tenaga fungsional (penyuluh kopreasi dan industri kecil) serta memberdayakan tenaga fungsional yang ada secara maksimal,
4. Memberdayakan serta membangkitkan semangat kerja PNS dalam mengemban tugas pekerjaan, kreatif, inovatif, disiplin dan profesional,

5. Mengoptimalkan pengelolaan sumber pembiayaan yang tersedia (APBD/APBN) untuk melaksanakan program pembangunan disektor koperasi, industri dan perdagangan.

Kondisi lingkungan kerja yang diharapkan tentunya dapat memberikan dukungan optimal terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, program kerja Dinas/Instansi serta stakeholder guna terwujudnya Visi Pembangunan Daerah dan pencapaian sasaran program pembangunan menuju Kota Bima "Water Front City".

2.3.3. Kondisi Eksternal

- a. Tumbuhnya wirausaha baru belum didukung oleh penguatan kapasitas yang memadai baik dari aspek lokasi usaha, permodalan, ketrampilan, maupun jaringan dan informasi pemasaran.
- b. Masih rendahnya pemanfaatan sumber daya lokal dalam pengembangan industri rumah tangga dan industri kecil menengah.
- c. Pengembangan industri olahan berbasis pertanian dan perikanan masih kurang diperhatikan baik perencanaan maupun pendanaannya.
- d. Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) belum dikelola dan ditata secara optimal.
- e. Prasarana dan sarana ekonomi masih terbatas dalam rangka mendukung peran dan fungsi Kota Bima sebagai kawasan strategis nasional dan kawasan strategis provinsi NTB.
- f. Sifat pasif dari pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya dan hanya menunggu dari bantuan pemerintah.
- g. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) dari para pelaku usaha.
- h. Kurangnya pembinaan terhadap koperasi sehingga perkembangan koperasi aktif cenderung tidak mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun dan juga jumlah koperasi tidak mengalami kenaikan.

2.3.3. Kondisi Internal

- a. Belum adanya pegawai yang memiliki keahlian yang spesifik dalam pembinaan di bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.
- b. Sarana dan prasarana kantor yang masih terbatas.
- c. Sarana dan prasarana untuk pembinaan masing-masing bidang belum tersedia.
- d. Database bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan belum tersusun secara baik.
- e. Pola pembinaan yang tidak berkelanjutan tiap tahunnya dikarenakan belum adanya standar penilaian terhadap pembinaan saat ini. Adapun pola pembinaan yang dilakukan saat ini :
 1. Pembinaan sumber daya manusia

2. Pembinaan pemanfaatan sumber daya alam lokal
3. Pembinaan dan pemanfaatan teknologi
4. Pembinaan/pengembangan dan peningkatan kreativitas dan inovasi
5. Penyediaan sumber pembiayaan

Dari berbagai permasalahan tersebut diatas, melahirkan beberapa isu-isu strategi yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan Rencana Strategis Tahun 2013-2018 yang terbagi menjadi isu nasional dan isu global dengan perincian sebagai berikut :

Isu Nasional :

1. Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
2. Perluasan Pasar Domestik
3. Perbaikan Infrastruktur
4. Peningkatan kemampuan Teknologi
5. Pemerataan Kemampuan Industri
6. Pemastian industri berwawasan lingkungan
7. Penciptaan Lapangan Kerja
8. Peningkatan Modal Koperasi

Isu Global :

1. Perluasan Pasar Modern
2. Diversifikasi Produk Ekspor
3. Perubahan Iklim

Untuk lebih jelasnya disajikan dalam bentuk tabel 5 sebagai berikut :

Tabel. 5
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019
dan Perkiraan Maju Tahun 2020

Kode Rek.							Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (out come) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2020	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2							3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	11	2	11	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Eksistensi Dinas terhadap Penyediaan barang /jasa dan administrasi perkantoran	Kota Bima	100 %	1,146,281,450	APBD II		100 %	1,260,909,595
						01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat dan menyurat	Kota Bima	1,150 Surat	383,140,000	APBD II		1,200 Surat	421,454,000
						02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Bima	100 %	156,480,000	APBD II		100 %	172,128,000
						06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kota Bima	100 %	1,910,000	APBD II		100 %	2,101,000
						07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kota Bima	100 %	100,400,000	APBD II		100 %	110,440,000
						08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Kota Bima	100 %	40,884,000	APBD II		100 %	44,972,400
						10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kota Bima	100 %	31,593,250	APBD II		100 %	34,752,575

						11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang dan cetakan dan penggandaan	Kota Bima	100 %	136,600,000	APBD II		100 %	150,260,000
						13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai	Kota Bima	90 %	16,650,000	APBD II		90 %	18,315,000
						15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	Kota Bima	5 Media Bacaan	8,400,000	APBD II		5 Media Bacaan	9,240,000
						17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum untuk menunjang kegiatan pegawai	Kota Bima	100 %	30,224,200	APBD II		100 %	33,246,620
						18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya perjalanan dinas luar daerah	Luar Daerah	55 Perjalanan	200,000,000	APBD II		65 Perjalanan	220,000,000
						19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya perjalanan dinas dalam daerah	Kota Bima	35 Perjalanan	40,000,000	APBD II		40 Perjalanan	44,000,000
2	11	2	11	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya penyediaan & pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Kota Bima	100 %	70,851,000	APBD II		100 %	77,936,100
						22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kota Bima	5 Unit	10,000,000	APBD II		5 Unit	11,000,000
						24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	Kota Bima	5 Unit	41,120,000	APBD II		5 Unit	45,232,000
						26	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Kota Bima	90 %	12,400,000	APBD II		90 %	13,640,000
						28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Kota Bima	90 %	7,331,000	APBD II		90 %	8,064,100

2	11	2	11	01	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pegawai yang mendapat hukuman disiplin	Kota Bima	0 %	27,350,000	APBD II	0 %	30,085,000
						02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas harian pegawai (PDH)	Kota Bima	38 Stel	27,350,000	APBD II	39 Stel	30,085,000
2	11	2	11	01	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan dengan indeks SAKIP	Kota Bima	85 %	192,500,000	APBD II	85 %	211,750,000
						02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersedianya laporan keuangan semesteran yang akuntabel	Kota Bima	2 laporan	6,450,000	APBD II	2 laporan	7,095,000
						03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersedianya laporan prognosis yang akuntabel	Kota Bima	2 Dokumen	29,800,000	APBD II	2 Dokumen	32,780,000
						04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun yang akuntabel	Kota Bima	4 Dokumen	11,100,000	APBD II	4 Dokumen	12,210,000
						05	Penyusunan rencana kerja tahunan/RKA/DPPA SKPD	Tersusunnya rka, rkap, dpa, dppa, renja	Kota Bima	5 Dokumen	63,250,000	APBD II	5 Dokumen	69,575,000
						06	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	Tersusunnya lakip dan lppd	Kota Bima	2 Dokumen	81,900,000	APBD II	2 Dokumen	90,090,000
2	11	2	11	01	15		Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Meningkatnya jumlah KUMKM yang berbadan hukum	Kota Bima	150 KUMKM	40,597,500	APBD II	200 KUMKM	44,657,250
						03	Fasilitasi kemudahan formalisasi badan Usaha Kecil Menengah	Meningkatnya jumlah KUMKM yang berbadan hukum	Kota Bima	150 KUMKM	40,597,500	APBD II	200 KUMKM	44,657,250
2	11	2	11	01	16		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	Meningkatnya pertumbuhan Wirausaha Baru	Kota Bima	150 WUB	444,729,000	APBD II & DAK	175 WUB	489,201,900

						06	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Meningkatnya pertumbuhan Wirausaha Baru	Kota Bima	150 WUB	199,738,000	DAK		175 WUB	219,711,800
						07	Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD	Meningkatnya management pengelolaan Koperasi	Kota Bima	85 %	157,262,000	DAK	#####	85 %	172,988,200
						11	Penyenggaraan bimbingan teknis bagi UMKM	Meningkatnya pengetahuan/ilmu yang dimiliki untuk mengembangkan usaha	Kota Bima	30 UMKM	87,729,000	APBD II		35 UMKM	96,501,900
2	11	2	11	01	17		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Meningkatnya pertumbuhan UMKM	Kota Bima	25 %	203,341,700	APBD II		30 %	191,559,170
						07	Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga	Meningkatnya promosi dan pemasaran produk UMKM	Kota Bima	10 UMKM	78,167,200	APBD II		15 UMKM	85,983,920
						09	Penyelenggaraan promosi produk UMKM	Meningkatnya promosi produk UMKM	Kota Bima	10 UMKM	95,977,500	APBD II		10 UMKM	105,575,250
						13	Operasional dan pengembangan UPT PLUT	Meningkatnya pelayanan dan operasional PLUT selama 12 bulan	Kota Bima	100 %	29,197,000	APBD II		100 %	32,116,700
2	11	2	11	01	18		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Meningkatnya jumlah Koperasi Aktif	Kota Bima	110 Koperasi	182,320,500	APBD II		120 Koperasi	200,552,550
						04	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman koperasi	Meningkatnya pengetahuan perkoperasi	Kota Bima	85 %	87,738,000	APBD II		85 %	96,511,800
						05	Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Meningkatnya Koperasi aktif	Kota Bima	110 Koperasi	36,762,200	APBD II		120 Koperasi	40,438,420
						10	Pendampingan bagi kelembagaan koperasi	Meningkatnya pengetahuan dan management pengelolaan Koperasi	Kota Bima	85 %	57,820,300	APBD II		85 %	63,602,330

3	06	2	11	01	15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Konsumen	Kota Bima	85 %	1,378,830,500	APBD II	85 %	1,516,713,550
					02	Kegiatan pendampingan penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen	Terfasilitasinya permasalahan atas pengaduan konsumen	Kota Bima	100 %	14,701,000	APBD II	100 %	16,171,100
					03	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Meningkatnya pengawasan peredaran barang dan jasa	Kota Bima	150 Pelaku Usaha	1,264,129,500	DAK	200 Pelaku Usaha	1,390,542,450
					06	Pengawasan peredaran Cukai Ilegal (CHT)	Meningkatnya pengawasan terhadap peredaran cukai hasil tembakau ilegal (rokok ilegal)	Kota Bima	150 Pelaku Usaha	100,000,000	APBD II	200 Pelaku Usaha	110,000,000
3	06	2	11	01	18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Meningkatnya Pemenuhan Barang dan Jasa	Kota Bima	2 Pasar	3,477,103,500	APBD II & DAK	2 Pasar	3,824,813,850
					03	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	Terlaksananya revitalisasi pasar sarae dan pembangunan pasar paruga	Kota Bima	2 Pasar	2,929,252,500	DAK	1 Pasar	3,222,177,750
					06	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Tersedianya informasi harga barang dan jasa	Kota Bima	12 Bulan	265,990,000	APBD II	12 Bulan	292,589,000
					08	Operasi Pasar Murah	Tersubsidinya sembako untuk masyarakat	Kota Bima	7,500 KK	176,325,000	APBD II	8,000 KK	193,957,500
					09	Operasional dan Pengembangan UPT Pasar	Meningkatnya pelayanan dan operasional UPT Pasar	Kota Bima	100 %	105,536,000	APBD II	100 %	116,089,600
3	07	2	11	01	15	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Meningkatnya nilai tambah produk industri kecil menengah (IKM)	Kota Bima	40 IKM	76,870,000	APBD II	50 IKM	84,557,000
					06	Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi	Terlaksananya diklat maupun magang bagi ikm	Kota Bima	40 IKM	76,870,000	APBD II	50 IKM	84,557,000

3	07	2	11	01	17		Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Meningkatnya industri kecil menengah (IKM) di daerah	Kota Bima	35 %	673,534,300	APBD II	40 %	740,887,730
						01	Pembinaan kemampuan teknologi industri	Meningkatnya mutu produk dan SDM pelaku IKM	Kota Bima	100 %	628,086,300	APBD II	100 %	690,894,930
						02	Pengembangan dan pelayanan teknologi industri	Meningkatnya kapasitas produksi dan mutu produk	Kota Bima	5 IKM	45,448,000	APBD II	10 IKM	49,992,800
3	07	2	11	01	19		Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	Meningkatnya Sentra Industri di daerah	Kota Bima	74 Sentra	849,025,600	APBD II & DAK	100 Sentra	933,928,160
						02	Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	Tersedianya informasi produk IKM	Kota Bima	100 %	14,340,000	APBD II	100 %	15,774,000
						04	Promosi kerajinan tangan	Meningkatnya promosi dan pemasaran produk ikm	Kota Bima	10 IKM	182,790,000	APBD II	12 IKM	201,069,000
						05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengembangan Sentra Industri	Meningkatnya Sentra Industri di daerah	Kota Bima	74 Sentra	651,895,600	DAK	74 Sentra	717,085,160
							JUMLAH				8,763,335,050			9,607,551,855

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari rancangan awal yang telah disusun oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja yang merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima Tahun 2018-2023 guna dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rancangan Rencana Kerja memuat informasi tentang rumusan kebutuhan program dan kegiatan hasil review terhadap rancangan awal RKPD yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kota Bima dan identifikasi program serta kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah berikut pendanaan indikatif.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima Tahun 2019 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima Tahun 2018-2023. RENJA Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima Tahun 2019 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bima Tahun 2019.

Dalam konteks perencanaan pembangunan sektor koperasi, industri dan perdagangan, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Disisi lain dalam era globalisasi, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima dituntut untuk siap dan sanggup membuat atau menyusun perencanaan yang baik sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Urusan Koperasi

Program dan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan usulan dan kebutuhan masyarakat melalui proses Musrenbang sesuai dengan tahapan serta dengan mencermati program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Dokumen Renstra OPD. Tahapan selanjutnya adalah perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan dan monitoring yang menurut aturan dan ketentuan termasuk kemungkinan pelibatan unsur/pihak ketiga termasuk jasa

konsultasi serta rekanan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terdiri atas :

1. Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif
2. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
3. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM
4. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro

Urusan Perindustrian

Program dan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan usulan dan kebutuhan masyarakat melalui proses Musrenbang sesuai dengan tahapan serta dengan mencermati program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Dokumen Renstra OPD. Tahapan selanjutnya adalah perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan dan monitoring yang menurut aturan dan ketentuan termasuk kemungkinan pelibatan unsur/pihak ketiga termasuk jasa konsultasi serta rekanan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perkembangan sektor industri dilaksanakan dengan tujuan memperkokoh struktur ekonomi daerah, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, penguatan dan pendalaman struktur industri yang terkait dengan agro industri, industri kecil dan menengah serta industri kerajinan dan rumah tangga dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada untuk menghasilkan nilai tambah barang dan jasa yang berorientasi pada pasar dalam dan luar negeri.

Urusan Perindustrian adalah Sebagai Berikut :

1. Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem produksi
2. Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
3. Pengembangan IKM
4. Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Urusan Perdagangan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan usulan dan kebutuhan masyarakat melalui proses Musrenbang sesuai dengan tahapan serta dengan mencermati program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Dokumen Renstra OPD. Tahapan selanjutnya adalah perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan dan monitoring yang menurut aturan dan ketentuan termasuk kemungkinan pelibatan unsur/pihak ketiga termasuk jasa konsultasi serta rekanan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Program pengembangan perdagangan pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan sistem perdagangan dalam negeri yang efisien, perlindungan terhadap konsumen dan pengembangan perdagangan luar negeri dalam rangka peningkatan ekspor serta

pengendalian impor, tujuan ini sangat erat hubungannya dengan upaya memperkuat pematapan struktur ekonomi daerah.

Urusan Perdagangan adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
2. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Kebijaksanaan pembangunan Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan di Kota Bima pada tahun 2019 diarahkan pada :

1. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan usaha Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
2. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan kepada pelaku usaha
3. Meningkatkan bantuan modal kerja
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk
5. Meningkatkan legalitas / ijin usaha
6. Meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah)
7. Meningkatkan bantuan peralatan usaha
8. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang usaha Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
9. Meningkatkan produktifitas, efisiensi daya saing usaha Perindustrian dan Perdagangan
10. Meningkatkan pendapatan dan pengusaha perajin

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Sektor Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan merupakan sektor yang secara langsung berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima terus meningkatkan perannya dalam mengembangkan Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.

Dalam tahun 2019 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima telah menetapkan sasaran yang ingin di capai sebagai berikut:

1. Meningkatnya pembinaan dan pengembangan usaha Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag)
2. Meningkatnya wawasan dan pengetahuan pelaku usaha
3. Meningkatnya bantuan modal kerja
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk
5. Meningkatnya legalitas / ijin usaha
6. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7. Meningkatnya bantuan peralatan usaha
8. Meningkatnya sarana dan prasarana usaha Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag)

9. Meningkatnya produktifitas, efisiensi dan daya saing usaha Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag)
10. Meningkatnya pendapatan pengusaha dan pedagang

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Koperindag Kota Bima untuk Tahun 2019 terdapat 7 program utama dan 7 program pendukung. Dimana program utama dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
2. Prgram perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.
4. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah.
5. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.
6. Program peningkatan kemampuan teknologi industry
7. Program pengembangan sentra-sentra industry potensial

Kegiatan adalah merupakan cara untuk mencapai tujuan yang dijabarkan ke dalam kebijakan – kebijakan dan program – program. Untuk mencapai tujuan / sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, maka dijabarkan kebijakan dan program sebagai pedoman / pegangan bagi para pelaksana kegiatan sebagai berikut

Sementara yang menjadi kelompok sasaran dari indikator kinerja OPD adalah masyarakat kota Bima dan internal OPD sendiri agar dapat menghasilkan optimalisasi pelayanan fungsi OPD bagi pembangunan kota Bima dalam mencapai visi & misinya.

Berdasarkan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima tahun 2019 yang terdiri atas 14 Program dan terurai melalui 48 kegiatan, maka dana indikatif yang dibutuhkan adalah sejumlah Rp.15.192.429.600,- dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima (APBD II) serta Dana Alokasi Khusus (DAK).

BAB VI

PENUTUP

Dalam mewujudkan visi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima yakni

“Berkembangnya Perekonomian Daerah Kota Bima Yang Berorientasi Pada Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Dan Kelembagaan Usaha ”

maka kematangan rencana strategis 2018 – 2023 yang tertuang dalam rencana kerja tahunan adalah pedoman kerja untuk tahun 2019.

Sehingga langkah menuju Visi Kota Bima “Terwujudnya Kota Bima Sebagai Kota Perdagangan Dan Jasa yang Beriman, Maju, Adil dan Sejahtera” dapat diwujudkan melalui partisipasi Dinas berdasarkan tupoksinya.

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat dipedomani, ditindaklanjuti dan diwujudkan bersama

.